



Pemusnahan Sampah Perlu Dilakukan di Banyak Lokasi

YOGYAKARTA - Masyarakat Yogyakarta dalam 1,5 bulan mendatang tidak bisa membuang sampah. Pemerintah menutup layanan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan karena kapasitasnya yang tak lagi mampu menampung limbah.

Akibatnya, sampah meluber hingga ke area pertanian dan menjadikan kawasan hijau tercemar. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta berpendapat penyelesaian masalah sampah sebenarnya sederhana, tidak rumit. Ia menilai kebijakan dan penanganan sampah di DIY saat ini mahal, rumit dan berisiko tinggi. Pasalnya, masyarakat mengumpulkan sampah di satu tempat yang jauh jadi satu dan tidak ada pemusnahan.

"Seluruh warga tergantung pada satu tempat di Piyungan. Masyarakat lokal menanggung risiko luar biasa, mereka terganggu ketika kapasitas sampah berlebihan. Selain itu, masyarakat yang lain juga terganggu karena tidak bisa buang sampah akibat penutupan TPA," ujar Huda, kemarin.

Seperti diberitakan kemarin, Sekretaris Daerah DIY, Beny Harsono dalam surat tertanggal 21 Juli 2023 menyatakan berdasarkan rapat Pemda DIY, Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta, sepakat menutup pelayanan TPST Piyungan. Tempat tersebut tidak mampu lagi menampung sampah karena kapasitasnya sudah berlebihan.

"Mohon kerja sama masing-masing kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penanganan sampah secara mandiri di wilayahnya," ujar Beny dalam suratnya.

Lokasi Tersebar

Huda yang juga anggota Fraksi PKS memberi solusi sampah dalam taraf tertentu harus dimusnahkan di lokasi yang tersebar, tidak di satu tempat. Saat ini banyak teknologi pemusnah sampah yang terjangkau dan bisa memusnahkan sampah secara massal. Pemerintah DIY dan kabupaten/kota bisa menyelenggarakan pemusnahan sampah tersebut.

Ia menegaskan, tidak perlu berwacana idealis misalnya mengubah sampah menjadi energi listrik atau komoditas mahal namun tidak terlaksana. Pemusnahan sampah mendesak supaya lingkungan bersih, memenuhi standar kesehatan. Pemusnahan sampah bukan untuk membuat energi atau komoditas canggih.

"Banyak yang bisa membuat alat pemusnah sampah, termasuk anak bangsa sendiri. Mereka bisa membuat dengan harga terjangkau dan biaya operasional juga tidak mahal. Misalnya, alat seharga Rp 30 miliar - Rp 50 miliar bisa memusnahkan sampah 300 meter kubik per hari dan semi portabel," ucap Huda.

Biaya sebesar itu bisa menyelesaikan masalah sampah Kota Yogyakarta dan sekitarnya dalam jangka panjang. Alat pemusnah sampah tidak memakan tempat besar. Bisa juga memakai depo-depo pengepulan. Biaya transportasi lebih hemat karena sampah tidak perlu dibawa ke lokasi yang jauh.

Ia membandingkan dengan TPST Piyungan yang dalam perluannya memerlukan anggaran Rp 30 miliar di luar tanah dan biaya operasional. Itu pun hanya bisa menampung beberapa bulan karena tidak ada pemusnahan hanya penumpukan.

"Kuncinya, musnahkan dan dekatkan. Teknologi dipakai sesuai standar saja, tidak usah muluk-muluk. Sampah jangan dianggap komoditas ekonomi bisnis mahal tapi sebagai risiko bersama yang butuh biaya pemusnahannya," tandasnya. (D19-48)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005